

## Semiloka 1 (3 hari): Jumat-Sabtu, 6 dan 7 Agustus 2010 Strategi Pembiayaan dan Penggalan Dana Kemanusiaan RS Non-Profit untuk melayani masyarakat miskin dan terpicil di Yogyakarta

### Pengantar

RS Yayasan mempunyai misi sosial yang berat. Selama ini ada pengalaman bahwa misi sosial rumahsakit non-profit keagamaan dilakukan melalui mekanisme subsidi silang, dari pasien kaya ke pasien miskin. Model pendanaan seperti ini dapat memberatkan rumahsakit. Donor kemanusiaan boleh dikatakan sudah berkurang, walaupun di masa lalu RS swasta di Indonesia mendapatkannya. Di sisi lain, dana dari Kementerian Kesehatan (kecuali dana Jamkesmas) jarang dipergunakan oleh pelayanan kesehatan swasta non-profit untuk pelayanan di daerah terpicil.

Dalam konteks tersebut ada beberapa pertanyaan: Pertama: Apakah memang tidak ada lagi masa depan donor kemanusiaan di RS swasta non-profit? Memang salah satu penyebabnya adalah tidak adanya dorongan untuk memberi donasi kepada RS karena sumbangan bagi RS tidak dapat diperhitungkan sebagai salah satu komponen pengurangan pajak bagi donatur. Tidak mengherankan bila RS nirlaba terpaksa bergantung kepada penerimaan dari pasien sebagai sumber penghasilan untuk menutup biaya operasional, sehingga banyak yang berpandangan bahwa RS nirlaba pun bertindak komersial. Adanya program Jamkesmas telah banyak membantu RS swasta memberikan pelayanan sosial kepada pasien miskin.

Pertanyaan kedua adalah apakah tidak ada masa depan untuk dana pemerintah khususnya dari Kementerian Kesehatan untuk rumahsakit swasta non-profit. Apakah mungkin dana pemerintah Indonesia dapat dipergunakan untuk "mengkontrak" lembaga pelayanan kesehatan swasta non-profit untuk menjalankan pelayanan kesehatan di daerah terpicil?

Jika kedua pertanyaan tersebut jawabannya memang tidak ada masa depannya, maka tidak mustahil keberlangsungan pelayanan sosial rumahsakit swasta non-profit untuk daerah terpicil hanya akan menjadi suatu cerita indah di masa lalu saja.

### Tujuan

#### Seminar:

- Membahas kebijakan pendanaan kementerian Kesehatan untuk rumahsakit non-profit, khususnya di daerah terpicil
- Membahas aspek penting donasi kemanusiaan untuk rumah sakit swasta non-profit

#### Workshop:

- Membahas prinsip-prinsip penggalangan dana kemanusiaan
- Membahas pengalaman penggalangan dana kemanusiaan di Indonesia dan di Australia.
- Memahami strategi penggalangan dana kemanusiaan
- Menyusun rencana operasional untuk penggalan dana kemanusiaan

### Waktu dan tempat pelaksanaan

Hari/tanggal : Jumat -Sabtu, 6 dan 7 Agustus 2010  
Tempat : Kampus UGM\*\*(tentative)

### Agenda dan pembicara

08.30- 09.00

#### Pembukaan

09.00-10.30

#### Sesi 1

##### Pengalaman – pengalaman:

- Pengalaman PERDHAKI dalam menggalang dana-dana kemanusiaan  
Suster Marita - Perdhaki
- Pengalaman Royal Children Hospital di Australia dalam menggalang dana kemanusiaan

10.30-11.00

#### Rehat pagi

11.00-12.30

#### Sesi 2

Faktor pendorong dan penghambat dana kemanusiaan

- Aspek sosio ekonomi dan kultural bangsa Indonesia
- Aspek Perpajakan dalam donasi  
Shita Dewi - PMPK FK UGM
- Potensi Zakat untuk dana kemanusiaan  
Husnan Nurjuman, SAg - MKKM

12.30-13.15

#### Makan siang

13.15-15.00

#### Sesi 3

- Prospek dana Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk pelayanan kesehatan oleh rumahsakit non-profit  
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan  
Pemerintah Daerah Kalimantan Timur

### INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Sdri. Chatarina Rika  
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan  
Fakultas Kedokteran – Universitas Gadjah Mada  
Phone. +62 274 549424, 549425  
Email: chatarina\_rika@yahoo.com

#### Kontribusi peserta

- Seminar 1: Rp 200.000,-
- Seminar 2: Rp 100.000,-
- Semiloka: Rp 500.000,-



Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan  
Fakultas Kedokteran UGM

Menyelenggarakan seri pertemuan hasil penelitian tentang

# Perkembangan RS Swasta Non-Profit dan tantangan masa depannya:

➔ **Seminar 1 (1 hari):**  
Kriteria Pelayanan sosial RS dan  
Konsesi Pajak untuk RS non-profit,  
Rabu, 9 Juni 2010, di Hotel Ciputra Jakarta

➔ **Seminar 2 (1 hari):**  
Tata Kelola Yayasan RS Swasta Non-Profit dan  
tantangannya, di Jakarta  
Rabu, 14 Juli 2010, di Gedung Granadi Lantai 10, Jakarta

➔ **Semiloka 1 (2 hari):**  
Strategi Pembiayaan dan Penggalan Dana Kemanusiaan  
RS Non-Profit untuk melayani masyarakat miskin dan  
terpicil,  
Jumat-Sabtu, 6 dan 7 Agustus 2010, di Yogyakarta

## Mengapa meyenggarakan seri pertemuan ini?

Penelitian Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) FK UGM bekerjasama dengan Nossal Institute University of Melbourne di tahun 2009 menyimpulkan berbagai hal menarik. Pertama, sebagaimana ditunjukkan oleh data Kementerian Kesehatan bahwa pertumbuhan rumah sakit nirlaba di Indonesia mengalami stagnasi dan bahkan penurunan persentase dalam 10 tahun terakhir. Kedua, sistem pengelolaan rumah sakit swasta non-profit belum mantap, dan berada dalam dukungan tata aturan hukum yang belum jelas. Ketiga, kebijakan pemerintah termasuk pembiayaan dan masalah pajak belum mendukung keberlangsungan RS-RS swasta Non-profit.

Dalam hal kebijakan pemerintah, terlihat bahwa pemerintah Indonesia belum menempatkan rumah sakit swasta non-profit sebagai mitra potensial yang dapat diajak untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat miskin dan di daerah terpencil. Padahal potensi rumah sakit-rumah sakit swasta yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti MUKISI, MKKM, Perdhaki, Pelkesi, PERSI, Arsada, sampai ke Asosiasi RS Pendidikan sangat besar untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat. Secara umum pertemuan ini berusaha menyajikan hasil penelitian FK UGM dan harapan RS-RS swasta non-profit. Diharapkan ada dialog dari berbagai pihak mengenai peran dan prospek rumah sakit swasta non-profit.

- Aspek keadilan sosial dan pajak rumah sakit non-profit: sebuah analisis studi banding Indonesia dan Australia  
F. Nefos Daeli, MKes - Pelkesi

### Pembahas:

- Rustam Effendi, Ak  
Kabid. Analisis Kebijakan Pajak dan PN3PI, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
- Benny Parlawan Sialagan, SH, MM, Kasi Materi Penyuluhan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
- Gede Ketut Wirakamboja, SKM, MPS, Kepala Bagian III Biro Perencanaan & Anggaran, Kementerian Kesehatan RI

### 12.15-13.00

Makan siang

### 13.00-14.30

#### Sesi 2

- Gambaran beban pajak di RS-RS Islam dan prospek ke depannya serta jenis pajak yang akan dikurangi  
Drs. H.S. Eko Prijono, MM- MUKISI
- Gambaran berbagai retribusi pemerintah daerah yang menjadi beban rumah sakit  
Drs. Syarifuddin.UH,MM-Kompartemen Pajak, PERSI

### Pembahas:

dalam konteks *Cost-benefit* pengurangan pajak RS untuk bangsa Indonesia

### 14.30-15.15

#### Penutup

*Plan of Action* penyusunan naskah akademik untuk RPP Pajak Rumah sakit  
Prof.Budi Sampurna - Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan

## Seminar 1: Rabu, 9 Juni 2010 Kriteria Pelayanan sosial RS dan Konsesi Pajak untuk RS non-profit di Hotel Ciputra, Jakarta

### Pengantar

Dengan dikeluarkannya UU Rumah sakit no. 44 tahun 2009 pasal 30 huruf (h) terdapat kesempatan bagi RS pendidikan dan RS publik untuk menerima fasilitas insentif pajak. Sebagaimana didefinisikan pada pasal 20 ayat (2) yang dimaksud RS publik adalah RS swasta yang dimiliki badan nirlaba, dan juga RS pemerintah. Akan tetapi kebijakan pajak dalam UU RS ini berada dalam sebuah situasi dimana UU Pajak tidak bersahabat dengan RS. Sebagai gambaran di masa lalu, RS nirlaba mendapat bantuan dari pemerintah maupun dari donasi. Namun saat ini, sudah tidak tersedia lagi bantuan subsidi dari pemerintah. Sementara, donasi pun semakin lama semakin jarang.

Masalah lain adalah Peraturan Pemerintah ini berdasarkan UU Rumah sakit. Dengan demikian yang menjadi motor penggerak adalah Kementerian Kesehatan. Akan tetapi UU lain menyatakan bahwa urusan pajak ada di bawah Kementerian Keuangan. Kebijakan UU ini harus diikuti oleh Peraturan Pemerintah sebagai kebijakan yang lebih operasional. Oleh karena itu pelaku penyusunan kebijakan insentif pajak bagi RS non-profit ini cukup rumit. Kebijakan tentang PP insentif pajak ini perlu dimulai dengan dialog antara berbagai pelaku di sektor kesehatan dengan sektor keuangan, dan juga Pemda, untuk membahas berbagai insentif yang semestinya bisa diterima.

### Tujuan

Seminar ini merupakan salah satu kegiatan untuk menindaklanjuti UU no.44 tahun 2009 tentang fasilitas insentif pajak untuk rumah sakit nirlaba dan rumah sakit pendidikan. Tindak lanjut ini dalam bentuk penulisan Peraturan Pemerintah yang harus selesai pada tahun 2011.

Secara khusus, Seminar ini bertujuan untuk:

- Membahas definisi operasional misi/pelayanan sosial dan bagaimana cara mengukurnya
- Membahas bentuk insentif pajak yang akan diberikan

- Membahas sistem pertanggungjawaban dan akuntabilitas insentif pajak untuk RS

### Waktu dan tempat pelaksanaan

Seminar akan dilaksanakan pada:  
Hari/tanggal : Rabu, 9 Juni 2010  
Tempat : Ruang Glory 3 -Hotel Ciputra, Lt. 6,  
Jl. Letnan Jenderal S Parman, Jakarta

### Hadirin yang diharapkan

Pimpinan dan staf Biro Hukum Departemen Kesehatan, Biro Perencanaan dan Penganggaran, Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik, Pengurus PERSI dan Pengurus Asosiasi RS: ARSADA, ARSPI, MKKM, Mukisi, ARSSI, Perdhaki, Pelkesi, dll; serta para peneliti manajemen RS.

### Agenda Acara

#### 09.00 -10.00

##### Pembukaan

Bapak Sumarsono, Pengurus PERSI

##### Pengantar Seminar:

Mengapa aspek pajak RS perlu untuk menjadi perhatian bangsa Indonesia?

Prof.dr.Laksono Trisnantoro, MSc.,Ph.D

PMPK FK UGM

#### 10.00-10.30

Rehat pagi

#### 10.30-12.15

##### Sesi I

- Aspek politik dan pengukuran benefit sosial perpajakan rumah sakit di Amerika Serikat dan Australia  
Shita Dewi - PMPK FK UGM

## Seminar 2: Rabu, 14 Juli 2010 Tata Kelola Yayasan Rumah sakit Swasta Non-Profit dan Tantangannya di Gd.Granadi Lt. 10, Kuningan, Jakarta

### Pengantar

RS swasta non-profit saat ini dapat berupa yayasan ataupun perkumpulan. Kedua bentuk hukum tersebut dibandingkan dengan bentuk hukum PT, relatif belum memadai untuk memicu perkembangan. UU Yayasan sendiri merupakan sebuah produk hukum yang belum sempurna karena masih banyak kekurangannya.

Salah satu hal penting dalam kekurangan Tata Kelola Yayasan adalah kerumitan akibat adanya 3 Dewan di UU Yayasan. Disamping itu dalam UU RS, dikenal pula adanya Dewan di RS yang dapat diadakan oleh sebuah RS. Dalam hal ini masih ada kebingungan antara Dewan dalam UU Yayasan dan Dewan dalam UU RS. Berbagai kerumitan dan ketidakjelasan ini tentunya dapat merugikan perkembangan RS Swasta non-profit di Indonesia. Sementara itu bentuk hukum Perkumpulan mengacu pada Stadblad jaman Belanda yang sangat longgar dan tidak dirancang untuk rumah sakit.

### Tujuan:

Dalam konteks belum sempurnanya UU Yayasan sebagai bentuk hukum RS, seminar ini diselenggarakan dengan tujuan:

1. Membandingkan tatakelola RS Swasta non-profit Indonesia dengan Australia.
2. Mengkritisi Kebijakan tata kelola RS swasta non-profit dalam UU Yayasan
3. Memberikan masukankebijakan untuk pemerintah Indonesia dalam tata kelola RS swasta.

### Waktu dan tempat pelaksanaan

Hari/tanggal : Rabu, 14 Juli 2010  
Tempat : Gd. Granadi Lt. 10, Jl.HR.Rasuna Said  
Kuningan, Jakarta

### Agenda dan Pembicara

#### 09.00-10.00

##### Pembukaan

PERSI

Pengantar Seminar:

Fungsi Board dalam RS non-profit dibandingkan dengan for-profit

Prof.dr.Laksono Trisnantoro, MSc,Ph.D  
PMPK FK UGM

#### 10.00-10.30

Rehat pagi

#### 10.30-12.00

##### Sesi I

- Permasalahan dalam menggunakan UU Yayasan sebagai dasar hukum untuk tata kelola RS  
Sigit Wijayanto, Ph.D  
(YAKKUM)
- Peranan Board dalam manajemen RS non-profit: Sebuah perbandingan dengan RS non-profit di Australia

#### 12.00-13.00

Makan siang

#### 13.00-14.30

##### Sesi 2

- Hubungan antara Organisasi Masyarakat dengan Rumah sakit  
Dr. Natsir Nugroho, Sp. OG, Mkes  
MKKM
- Sistem bekerja RS dengan model jaringan

#### 14.30-15.00

##### Penutup